

FORMAT MATRIKS RENCANA AKSI
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Rencana Aksi	Target Nilai PK 2024	Satuan	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Evidence
					Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Bidang Hukum	3,30														
		1. Pengembangan Aplikasi JDIH		Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi JDIH	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi JDIH	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi JDIH	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi JDIH	Sosialisasi JDIH ke Anggota JDIH Setjen DPR	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi JDIH	Penyempurnaan Aplikasi JDIH	Penyempurnaan Aplikasi JDIH	Monitoring pengelolaan JDIH	Monitoring pengelolaan JDIH	Evaluasi atas monitoring pengelolaan JDIH	Laporan
		2. Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum		Dokumen	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Pelayanan pertimbangan dan advokasi hukum	Laporan
		3. Survey Internal Layanan Hukum		Dokumen								Persiapan survei (Penentuan responden, metode survei dan menyusun konsep pertanyaan)	Pelaksanaan survei	Pengolahan data hasil survei dan penyusunan laporan hasil survei	tindak lanjut hasil survei	Laporan	
		2. Persentase Capaian Pembentukan Produk Hukum	100	Persen													
		1. Pembentukan Persejken, MoU, dan Perjanjian		Dokumen	1. Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian 2. Konsinyering dalam rangka pembahasan rancangan Persejken tentang Arsip Vital Setjen DPR RI	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian	1. Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian 2. Benchmarking dalam rangka penyusunan Persejken Manajemen Layanan Teknologi Informasi	1. Penyusunan/ pembahasan/ evaluasi Persejken, MoU, dan Perjanjian 2. Benchmarking dalam rangka penyusunan Persejken Pengelolaan Pusat Data	1. Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian 2. Benchmarking dalam rangka penyusunan Persejken Pengelolaan Pusat Data	Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian	Penyusunan/ pembahasan/ penetapan Persejken, MoU, dan Perjanjian	1. Persejken 2. MoU 3. Perjanjian 4. Keputusan penetapan Prolegset 2023
		2. Evaluasi Program Legislasi Sekretariat Jenderal tahunan		Kegiatan					Evaluasi program pembentukan Peraturan			Evaluasi program pembentukan Peraturan Sekretaris				Laporan	
		3. Identifikasi dan Analisis Persejken		Dokumen	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken	1. Identifikasi dan Analisis Usulan Persejken 2. Penyusunan Program Legislasi Sekretariat Jenderal 2024	1. Laporan 2. Draf Keputusan Sekjen penetapan Prolegset 2024
		4. Evaluasi Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR		Kegiatan	1. Evaluasi Produk Hukum 2. Benchmarking dalam rangka perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kerja sama	1. Evaluasi Produk Hukum 2. Konsinyering dalam rangka implementasi Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Setjen DPR RI	1. Evaluasi Produk Hukum 2. Konsinyering dalam rangka evaluasi Persejken terkait Jabatan Fungsional setelah diterbitkannya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi Produk Hukum	1. Evaluasi Produk Hukum 2. Benchmarking dalam rangka pemyederhanaan birokrasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kerja sama 3. Konsinyering dalam rangka pembahasan pedoman TSP Setjen DPR RI 4. Konsinyering dalam rangka evaluasi Persejken terkait Jabatan Fungsional	Evaluasi Produk Hukum	1. Evaluasi Produk Hukum 2. Benchmarking dalam rangka pembentukan dan evaluasi produk hukum	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi Produk Hukum	Laporan
		3. Persentase Pengaduan	100	Persen													
		1. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS)		Dokumen	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Peningkatan dan Pengembangan SIDUMAS	Monitorinf dan evaluasi Pengembangan SIDUMAS	Laporan

	Indikator	Target/Nilai	Kegiatan	TW 1				TW 2			TW 3			TW 4			Laporan
				Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp	Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp												
	2. Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp		Kegiatan	Perubahan Layanan SMS menjadi WhatsApp	Laporan												
	3. Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan ke DPR RI dan Sekretariat Jenderal		Dokumen	Kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat	Laporan												
	4. Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat		Kegiatan	Peningkatan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Laporan												
	4. Nilai IKPA Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	96															
	Revisi DIPA	9,60															
	Devisi Halaman III DIPA	19,20															
	Penyerapan Anggaran	24,00															
	Penyelesaian Tagihan	14,40															
	Capaian Output	28,80															
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran					Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran	Laporan										
	5. Persentase Realisasi Anggaran	98	Persen														
	1. Rapat-rapat koordinasi jajaran hukum dan dumas		Kegiatan	Menyusun laporan realisasi anggaran	Rapat-rapat koordinasi	Laporan											
	2. Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat, peningkatan indeks informasi hukum dan indeks kebijakan		Kegiatan			Sosialisasi Pengelolaan Aspirasi dan Dumas						Workshop Penanganan Optimalisasi Pengaduan Masyarakat				Laporan	
	3. Evaluasi pembangunan Zona Integritas Biro Hukum dan Dumas menuju WBK dan WBBM		Kegiatan					Paket Meeting dalam rangka pembahasan dan evaluasi ZI menuju WBK					Paket Meeting Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas			Laporan	
	4. Pendaftaran Seminar/Workshop Analisis Hukum dan Tenaga Administrasi		Kegiatan				Pelaksanaan Seminar/Workshop Tenaga Administrasi					Pelaksanaan Seminar/Workshop Analisis Hukum				Laporan	

Jakarta, 29 Februari 2024
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
NIP. 19690801199403 2 001